

Analisis Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor: Perspektif Administrasi dan Keuangan

Friedrich Max Rumintjap^{1*}, Fadillah Amin²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

* fritsmr@yahoo.com

Abstract. This study investigates the participation in the BPJS Kesehatan program in Bogor Regency, focusing on the challenges in implementation and solutions to improve healthcare service accessibility. The primary methodology used was a Systematic Literature Review (SLR) to identify and analyze the impact of local regulations and discrepancies in data registration between institutions. The findings indicate that ineffective regulations and serious gaps in data registration significantly hinder the achievement of Universal Health Coverage (UHC). Initiatives like the BPJS mobile service and the use of DTKS have not been effective enough in addressing the issues of payment arrears and uneven access. The study suggests that inter-agency synergy and policy revisions are necessary to ensure that all citizens have fair and equal access to health services. These recommendations aim to support more inclusive and effective healthcare service policies in Bogor Regency. **Keywords:** BPJS Participation, Universal Health Coverage, health regulations, healthcare accessibility.

1. Pendahuluan

Kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan adalah langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menyediakan jaminan kesehatan nasional yang inklusif dan merata. Program ini bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk di Kabupaten Bogor. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan kompleks. Artikel ini mengulas secara kritis kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor dari perspektif administrasi dan keuangan, dengan fokus pada hambatan regulasi dan solusi potensial.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bogor telah mencapai tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 84% (Rakyat Bogor, 2022). Meskipun cakupan ini signifikan, terdapat kendala besar terkait tunggakan iuran yang menghambat akses layanan kesehatan. Hingga Agustus 2022, sekitar 586 ribu peserta BPJS Kesehatan menunggak pembayaran, mencerminkan masalah struktural dalam sistem pengelolaan dan administrasi BPJS Kesehatan di daerah tersebut (Widodo, 2022).

Menariknya, teori administrasi publik mengajarkan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan implementasi kebijakan secara efektif (Denhardt & Denhardt, 2015). Dalam hal BPJS Kesehatan, ini berarti perlu adanya sistem yang lebih baik untuk menangani masalah tunggakan iuran melalui pendekatan yang lebih proaktif dan efisien.

Regulasi lokal, seperti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 60 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 65 Tahun 2017, memperumit situasi. Perbup Nomor 60 Tahun 2023 mengharuskan warga miskin terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Banyak warga yang memenuhi syarat tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena tidak terdaftar dalam DTKS, yang proses pendataannya masih jauh dari sempurna (Salim, 2024).

Agus Salim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa lebih dari 100 ribu kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan karena tidak terdaftar dalam DTKS (Salim, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi data yang lebih baik antara BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial untuk mengatasi masalah ini.

Pendekatan teori kebijakan publik oleh Dye (2013) menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara kontinu untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam

Perbup No. 60 Tahun 2023, evaluasi dan revisi kebijakan menjadi krusial untuk menghilangkan hambatan administratif yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dampak langsung dari regulasi ini terlihat pada kasus ibu Ocah dari Desa Cimanggu 1, yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena anaknya tidak terdaftar di DTKS, meskipun sudah memiliki BPJS PBI. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan dan inefisiensi dalam sistem yang seharusnya melindungi masyarakat miskin ([Centralnews24, 2024](#)). Kasus ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam kebijakan dan implementasi program kesehatan di Kabupaten Bogor.

Menurut teori keadilan sosial oleh [Rawls \(1971\)](#), setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan setara dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk kesehatan. Ketidakmampuan ibu Ocah untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan distributif, yang menuntut bahwa sumber daya publik harus didistribusikan secara adil dan merata.

BPJS Kesehatan Cabang Cibinong telah mengadakan layanan keliling di Kecamatan Sukaraja untuk meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan pendaftaran peserta baru serta perubahan data kepesertaan ([Biantoro, 2019](#)). Namun, inisiatif ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah tunggakan iuran yang besar. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo, mengusulkan penerapan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor, yang sudah berhasil diterapkan di DKI Jakarta dan Kota Bogor. Program UHC memungkinkan warga yang memiliki tunggakan tetap mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP dan memilih perawatan di kelas tiga ([Widodo, 2022](#)).

Penerapan UHC sejalan dengan teori sistem kesehatan oleh [Andersen dan Newman \(1973\)](#), yang menekankan pentingnya aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas dalam sistem kesehatan. Dengan mengadopsi UHC, Kabupaten Bogor dapat menyederhanakan prosedur administrasi yang saat ini sangat rumit dan membingungkan bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa semua warga yang membutuhkan mendapatkan layanan yang tepat waktu dan memadai.

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu segera merevisi atau mencabut Perbup yang bermasalah dan mengadopsi program UHC untuk memastikan akses yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data yang lebih baik antara BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa semua warga yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dapat terlayani tanpa hambatan administratif.

Sinergi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial sangat diperlukan untuk mengatasi masalah data dan administrasi. Menurut teori organisasi oleh [Mintzberg \(1979\)](#), koordinasi yang efektif antara berbagai unit organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, koordinasi yang lebih baik antara BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial dapat memastikan bahwa program kesehatan di Kabupaten Bogor berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Analisis ini menyoroti pentingnya evaluasi dan revisi kebijakan yang ada untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Penerapan program UHC di Kabupaten Bogor dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa seluruh warga, terutama yang kurang mampu, mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan. Dengan sinergi yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait, diharapkan masalah kepesertaan dan akses layanan kesehatan di Kabupaten Bogor dapat teratasi secara efektif.

Pendekatan berbasis teori dan konsep yang relevan menunjukkan bahwa masalah kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor dapat diatasi melalui perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penerapan program yang lebih inklusif seperti UHC. Dengan demikian, Kabupaten Bogor dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi jaminan kesehatan nasional yang adil dan merata.

Selain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Public Finance di Program Doktorat Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor dari perspektif administrasi dan keuangan. Penulisan ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Dengan mengintegrasikan teori-teori relevan dan data empiris, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil, serta memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga terkait. Harapannya, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar

untuk perbaikan kebijakan dan implementasi yang lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan jaminan kesehatan nasional yang merata dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review, SLR). SLR merupakan pendekatan metodologis yang memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil-hasil penelitian yang telah ada secara sistematis dan transparan. Dengan menerapkan SLR, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai manajemen strategis dalam BPJS Kesehatan, mengingat kompleksitas dan variasi tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor.

3. Hasil dan Pembahasan

BPJS Kesehatan merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, 87,28 persen atau 4.710.176 dari 5.385.219 warga Kabupaten Bogor telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan. Hal ini mencerminkan upaya yang signifikan dari pemerintah daerah dalam mencapai UHC, yang menargetkan cakupan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Menurut teori administrasi publik, pencapaian ini adalah hasil dari kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan aksesibilitas layanan kesehatan, sebagaimana dikemukakan oleh [Denhardt dan Denhardt \(2015\)](#).

Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)

Pencapaian UHC di Kabupaten Bogor bisa dilihat sebagai manifestasi dari konsep 'Public Value Governance', seperti yang diuraikan oleh John Bryson dan Barbara C. Crosby dalam artikel mereka mengenai evolusi administrasi publik. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai publik, yang mencakup demokrasi, keadilan, dan partisipasi aktif warga, harus menjadi panduan utama dalam pengelolaan pelayanan publik.

Pendekatan Public Value Governance menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai publik dan kolaborasi dalam mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk kesehatan masyarakat. Pencapaian cakupan BPJS Kesehatan yang tinggi di Kabupaten Bogor sesuai dengan konsep ini, di mana pemerintah daerah berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan akses yang merata ke layanan kesehatan.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun pencapaian UHC di Kabupaten Bogor patut diapresiasi, implementasi kebijakan yang tergesa-gesa dan kurang sosialisasi menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 60 Tahun 2023 yang mengharuskan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai syarat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) telah menimbulkan kendala di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPC PWRI Bogor, Rohmat Selamat, perubahan ini dilakukan dengan terburu-buru dan kurang sosialisasi, sehingga banyak warga miskin yang belum terdaftar di DTKS mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan ([Buktipeunjuk.id, 2024](#)).

Kasus Nyata dan Dampak Kebijakan

Kasus Ibu Ocah di Kecamatan Cibungbulang, yang anaknya harus mendapatkan perawatan intensif namun tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan atau JAMKESDA karena belum terdaftar di DTKS, menjadi contoh nyata dampak negatif dari kebijakan ini. Menurut teori keuangan publik oleh [Musgrave dan Musgrave \(1989\)](#), kebijakan kesehatan yang tidak diimbangi dengan persiapan administrasi yang matang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pembiayaan dan pelayanan.

Perubahan kebijakan yang mendadak dan kurangnya sosialisasi sering kali menyebabkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan layanan kesehatan. [Musgrave dan Musgrave \(1989\)](#) dalam teori keuangan publiknya menyatakan bahwa kebijakan publik harus diimplementasikan dengan persiapan administrasi yang matang untuk menghindari ketidakpastian dalam pembiayaan dan pelayanan. Implementasi Perbup Bogor Nomor 60 Tahun 2023 tampaknya mengabaikan prinsip ini, karena banyak warga miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat belum terdaftar di DTKS.

Pentingnya Perencanaan yang Matang dalam Kebijakan Publik

Alan J. Auerbach juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang baik dalam kebijakan publik untuk memastikan hasil yang positif. Dalam bukunya "Public Finance in Practice and Theory," Auerbach menekankan bahwa perpindahan antara teori dan praktik membutuhkan perhatian terhadap persiapan administratif untuk menghindari kebijakan yang buruk meskipun kebijakan yang lebih baik tersedia ([Auerbach, 2009](#)).

Namun, tidak semua ahli setuju dengan pandangan ini. [Denhardt dan Denhardt \(2015\)](#) dalam "The New Public Service: Serving, Not Steering" menyatakan bahwa kebijakan publik harus berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan bukan hanya pada administrasi yang kaku. Mereka berpendapat bahwa partisipasi aktif masyarakat dan adaptasi kebijakan yang cepat dapat lebih efektif dalam beberapa situasi, terutama ketika menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Dalam hal ini, meskipun implementasi Perbup Bogor Nomor 60 Tahun 2023 mungkin terlihat terburu-buru, bisa jadi langkah tersebut diambil untuk menanggapi kebutuhan mendesak di bidang kesehatan daerah.

Perspektif Administrasi Publik dan Keuangan

Dalam administrasi publik dan keuangan, aspek pembiayaan layanan kesehatan perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Dengan sebagian besar peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), keberlanjutan finansial dari program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan daerah. Model pembiayaan yang mencakup diversifikasi sumber pendapatan, seperti yang diusulkan oleh [Musgrave dan Musgrave \(1989\)](#), harus dipertimbangkan untuk mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul akibat ketergantungan pada satu sumber pendanaan.

Integrasi sistem informasi dan data sangat penting dalam administrasi kesehatan. Menurut [Fountain \(2001\)](#), penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi layanan dan aksesibilitas informasi. Namun, implementasi yang buruk tanpa persiapan yang memadai dapat mengakibatkan inefisiensi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah, seperti yang terlihat dalam kasus Kabupaten Bogor. Ketidakmampuan untuk mengelola perubahan dan adaptasi teknologi menunjukkan kelemahan dalam manajemen, yang seharusnya menjadi fokus utama untuk meningkatkan kinerja layanan publik.

Analisis Kebijakan dan Implikasi

Dalam literatur administrasi publik, [Frederickson \(1997\)](#) menyatakan bahwa good governance memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasi kebijakan. Kasus di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD, mencerminkan defisit dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh [Fountain \(2001\)](#) bahwa integrasi data dan sistem informasi adalah kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, termasuk kesehatan. Implementasi DTKS sebagai syarat utama tanpa persiapan yang memadai menunjukkan kelemahan dalam manajemen perubahan dan adaptasi teknologi, yang justru bisa memperburuk aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

[Ali Ghufron Mukti et al. \(2022\)](#) dalam ulasan mereka tentang BPJS Kesehatan mencatat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program JKN adalah kualitas data dan sistem informasi yang digunakan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas data penerima manfaat, namun tantangan tetap ada dalam hal integritas dan keakuratan data tersebut. Proses audit yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang mengeluarkan 9 juta penerima manfaat dari daftar subsidi JKN menunjukkan adanya kesenjangan dalam manajemen data yang perlu segera diatasi.

Lebih lanjut, dalam analisis keuangan publik, [Musgrave dan Musgrave \(1989\)](#) menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi risiko keuangan. Dalam BPJS Kesehatan, ini bisa berarti memperluas basis pendapatan melalui kontribusi yang lebih beragam, termasuk potensi kerjasama dengan sektor swasta atau inisiatif lain yang dapat memperkuat stabilitas finansial program.

Guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah harus mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Ini termasuk meningkatkan transparansi dalam proses administrasi, memastikan keterlibatan aktif dari semua pemangku

kepentingan, dan menerapkan strategi manajemen keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan UHC dapat tercapai dengan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip good governance adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam administrasi publik dan manajemen kesehatan. Hal ini tidak hanya membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap tahap implementasi kebijakan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Pendekatan good governance dan diversifikasi sumber pendapatan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan kualitas data dan sistem informasi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program JKN berjalan dengan baik dan mencapai tujuan UHC secara efektif. Kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4. Kesimpulan dan Saran

- 1) Penelitian ini telah menyelidiki berbagai aspek kepesertaan dalam BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor, mengungkap bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam cakupan, masih terdapat hambatan besar dalam aksesibilitas dan kualitas layanan yang disediakan. Isu utama yang ditemukan termasuk tunggakan iuran besar, prosedur administratif yang rumit, dan kurangnya sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
- 2) Regulasi yang tidak efisien seperti Perbup Nomor 60 Tahun 2023 telah menimbulkan kesulitan tambahan bagi warga miskin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan karena belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, inisiatif seperti layanan keliling BPJS Kesehatan, meskipun bermanfaat, belum cukup untuk mengatasi masalah keberlanjutan dan keadilan dalam akses layanan kesehatan.
- 3) Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan program Universal Health Coverage (UHC) secara lokal di Kabupaten Bogor dapat memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dalam pengelolaan program kesehatan yang bisa memberikan layanan yang lebih adil dan merata.

Saran

- 1) Revisi Regulasi
Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera merevisi atau mencabut Perbup yang menyulitkan, khususnya yang berkaitan dengan syarat pendaftaran DTKS, untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang layak menerima layanan yang tertinggal karena hambatan administratif.
- 2) Peningkatan Sinkronisasi Data
Diperlukan peningkatan sinkronisasi dan integrasi data antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Hal ini akan memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan terbaru, memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif.
- 3) Implementasi UHC
Mengadopsi dan menyesuaikan program UHC di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan. UHC harus dirancang untuk mempermudah warga, terutama yang memiliki tunggakan, untuk tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan menunjukkan KTP.
- 4) Evaluasi Berkala
Melakukan evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini harus melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam.
- 5) Edukasi dan Sosialisasi
Memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal.

References*

- [1] Andersen, R. M., & Newman, J. F. (1973). Societal and individual determinants of medical care utilization in the United States. *The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society*, 51(1), 95-124.
- [2] Auerbach, A. J. (2009). *Public Finance in Practice and Theory*. University of California, Berkeley.
- [3] Biantoro, W. (2019). BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor Akan Melaksanakan Layanan Keliling Diwilayah Kecamatan Sukaraja. *Berantas Online*.
- [4] Bozeman, B. (2007). *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- [5] Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). *Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management*. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456.
- [6] Buktipetunjuk.id. (2024). Ketua DPC PWRI Bogor Desak Bupati Cabut Perbup No 60 Tahun 2023. Buktipetunjuk.id. Retrieved from <https://buktipetunjuk.id/ketua-dpc-pwri-bogor-desak-bupati-cabut-perbup-no-60-tahun-2023>
- [7] Centralnews24. (2024, March 15). Di Nilai Sangat Menyusahkan Masyarakat Mencari Bantuan Pencairan PBI.
- [8] Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- [9] Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- [10] Fountain, J. E. (2001). *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- [11] Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- [12] Frischa, Y., Noerjoedianto, D., & Hubaybah. (2023). Study of the patterns of health finance utilization in the National Health Security (JKN) era of non-PBI participants at H. Abdul Manap Hospital. *International Journal of Health Science*, 3(1), 170-176.
- [13] Ghufon Mukti, A., Jaya, C., & Suhardi, R. L. (2022). Current Condition of Social Security Administrator for Health (BPJS Kesehatan) in Indonesia: Contextual Factors that Affected the National Health Insurance. *Medical Journal of Indonesia*, 31(2), 87-90.
- [14] Manzoor, A. (2014). "A Look at Efficiency in Public Administration: Past and Future". SAGE Open.
- [15] Meynhardt, T. (2009). Public Value Inside: What is Public Value Creation? *International Journal of Public Administration*, 32(3-4), 192-219.
- [16] Mintzberg, H. (1979). *The structuring of organizations: A synthesis of the research*. Prentice-Hall.
- [17] Mukti, A.G., Jaya, C., & Suhardi, R.L. (2022). Current condition of social security administrator for health (BPJS Kesehatan) in Indonesia: contextual factors that affected the national health insurance. *Medical Journal of Indonesia*, 31(2), 87-90
- [18] Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Education.
- [19] Rakyat Bogor. (2022, August 29). Tingkat Kepesertaan BPJS Sudah 84 Persen, Rakyat Mau Berobat Gratis, Terbentur Perbup.
- [20] Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- [21] Rhodes, R. A. W., & Wanna, J. (2007). The Limits to Public Value, or Rescuing Responsible Government from the Platonic Guardians. *Australian Journal of Public Administration*, 66(4), 406-421.
- [22] Salim, A. (2024). Timbulkan Banyak Masalah, DPRD Minta Pemkab Bogor Masukkan Perbup BPJS dalam Pembahasan RKPD. *Pakuan Raya*.
- [23] Sari, A. R. (2023). "The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making". *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*.
- [24] Widodo, T. (2022). *Kepesertaan BPJS dan Tantangan Implementasi UHC di Kabupaten Bogor*. Rakyat Bogor.